

Buku Panduan *Pendataan*

*Rumah Pesisir di
BP3KP Jawa I*



Gotong Royong
Membangun *Rumah*
Untuk Rakyat

Penyusun

Pengarah

Elias Wijaya Panggabean, S.T., M.T.

Mohammad Iqbal, S.T.

Ilim Abdul Karim, S.Ag., M.Si.

Penulis

Firda Afifa, S.PW.K.



Daftar Isi

- 1 Latar Belakang**
- 2 Landasan Hukum**
- 3 Stakeholder yang Terlibat**
- 4 Alur Pendataan**
- 5 Kebutuhan Data**
- 6 Format dan Tata Cara Pengisian Pendataan**
- 7 Daftar Pustaka**



Tentang **BP3KP Jawa I**

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I adalah unit pelaksana di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab atas program penyediaan dan penataan perumahan serta kawasan permukiman di wilayah Jawa I, meliputi Provinsi DK Jakarta dan Provinsi Banten.

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025, Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa 1 adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

1 Latar Belakang

■ BACKLOG PERUMAHAN NASIONAL



Sumber: Data BPS (Susenas) Tahun 2023

■ PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN BRABOWO

Terkait Sektor Perumahan Nomor 13

“Menjamin Rumah Murah dan Sanitasi untuk Masyarakat Desa dan Rakyat yang Membutuhkan”

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah harus hadir memberikan rumah yang murah dan sanitasi yang baik bagi Masyarakat yang membutuhkan.

■ URGENSI PENDATAAN

- Monitoring Rumah Delineasi Pesisir sebagai Bagian dari Capaian Program 3 Juta Rumah
- Pemetaan Kebutuhan dan Ketersediaan Rumah
- Dasar Perencanaan Program dan Pengambilan Kebijakan Perumahan

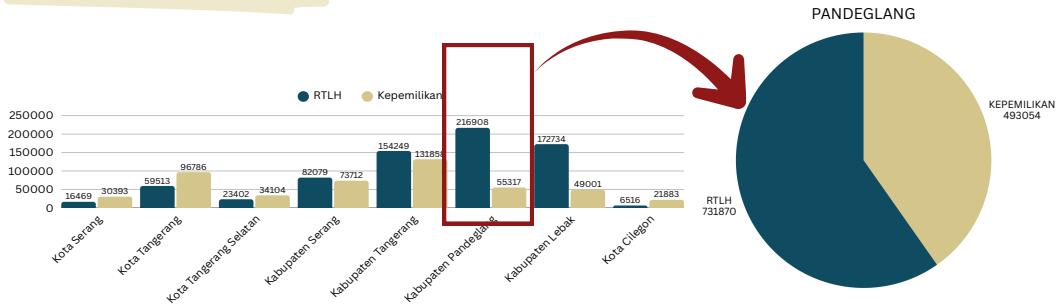
“Kegiatan Pendataan Rumah Pesisir bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data, serta memberikan kepastian, keamanan, dan membantu mencegah akses tidak sah, melindungi data, dan memastikan integritas data rumah pesisir”

BACKLOG PERUMAHAN PESISIR DI BP3KP JAWA I

BACKLOG PERUMAHAN KAB. KEPULAUAN SERIBU, DK JAKARTA



BACKLOG PERUMAHAN KAB. PANDEGLANG, BANTEN



 Backlog Kepemilikan

 Backlog Kelayakan (RTLH)

Sumber: BP3KP Jawa I (2025)



2 *Landasan* **Hukum**



UU No. 27 Tahun 2007

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



UU No. 1 Tahun 2011

Perumahan dan Kawasan Permukiman



UU No. 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah



Permen PUPR No. 12 Tahun 2020

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

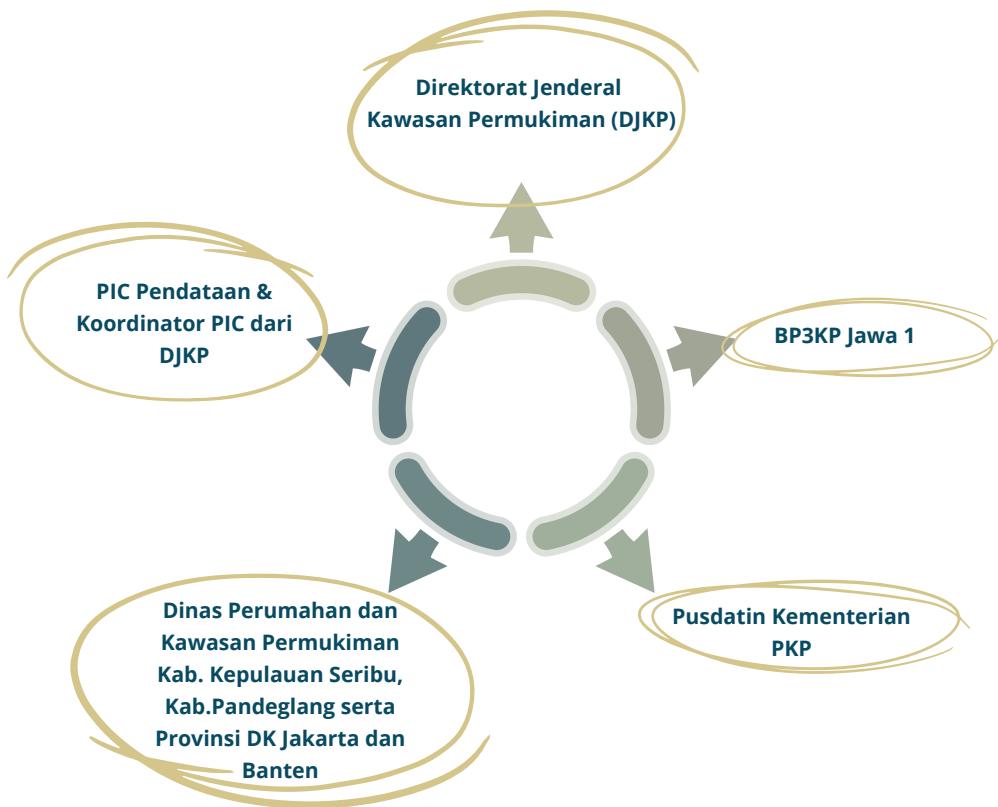


Keputusan Menteri PKP No. 023/KPTS/M/2025

Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah

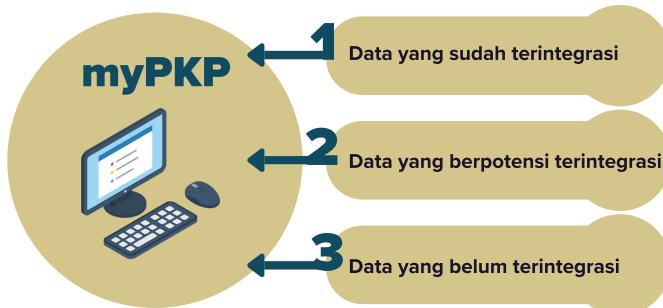


3 Stakeholder yang Terlibat



4 Alur Pendataan di BP3KP Jawa 1

Alur pendataan di BP3KP Jawa I adalah sebagai berikut:



1 Data yang sudah terintegrasi

- Sikumbang (BP Tapera)
- SIMBG (DJCK, Kementerian PU)

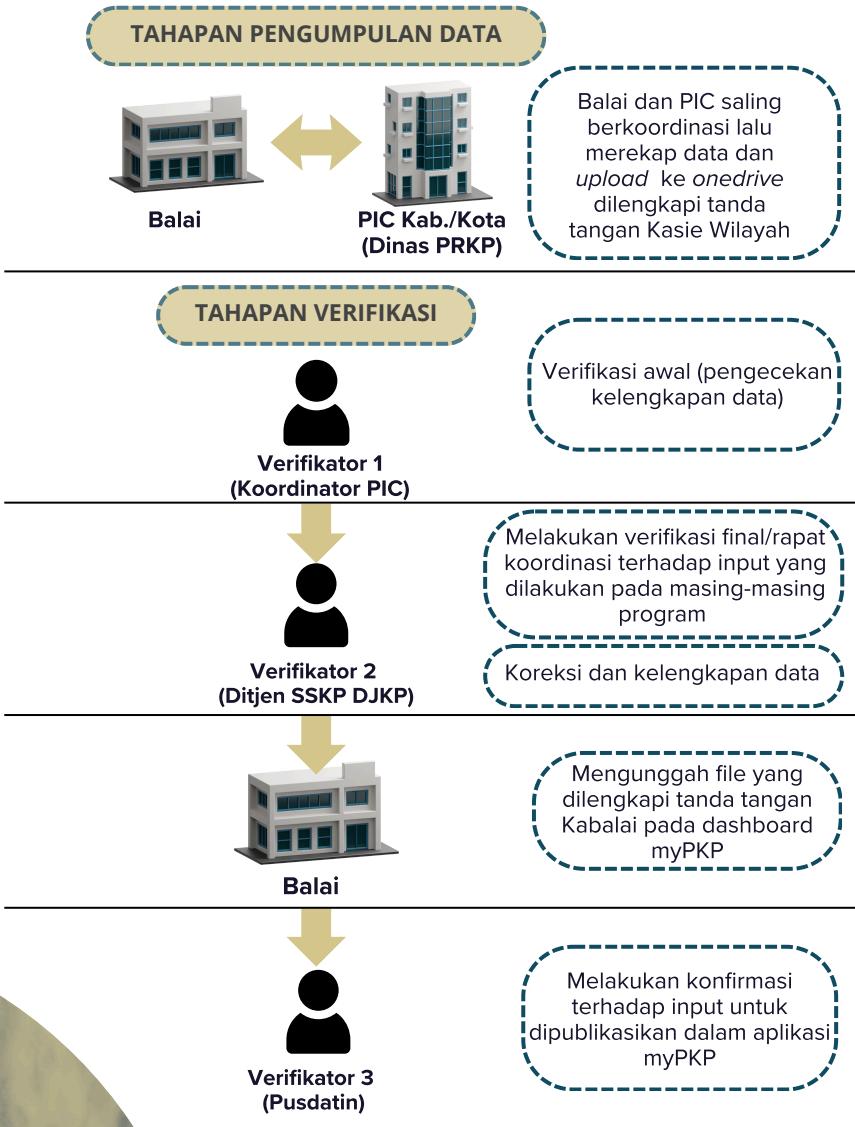
2 Data yang berpotensi terintegrasi

- Sistem Informasi K/L Lain
- Sistem Informasi Pemda

3 Data yang belum terintegrasi

Data yang belum terintegrasi > Pendataan lapangan dan/atau dari Pemda melalui PIC > Input ke format excel > Verifikasi data oleh DJKP > Finalisasi data oleh Pusdatin Kementerian PKP

Tahapan Pendaftaran



5 Kebutuhan Data

Pendataan Perumahan Pembangunan Baru (PB)

Meliputi data Nama Perumahan, Jenis Rumah, MBR/Non-MBR, Target Unit, Realisasi Unit, Tahun Pembangunan, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Koordinat, Jenis Program, Sumber Daya, Program, Jumlah Anggaran, dan Dokumentasi



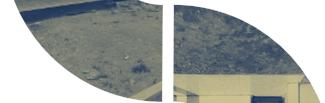
Pendataan Perumahan Peningkatan Kualitas (PK)

Meliputi data Nama Perumahan, Jenis Rumah, MBR/Non-MBR, Target Unit, Realisasi Unit, Tahun Pembangunan, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Koordinat, Jenis Program, Sumber Daya, Program, Jumlah Anggaran, dan Dokumentasi



Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

Meliputi data Nama, Nomor KK, Nomor NIK, Alamat, Kerusakan Komponen Rumah (fondasi, sloop, kolom, ring balok/balok, rangka atap, penutup atap, dinding, dan lantai), serta Sumber Air Minum dan Akses Sanitasi



Pendataan Ketersediaan Lahan Potensial

Meliputi data Kecamatan, Desa, Koordinat, dan Potensi Lahan (status kepemilikan, jenis hak tanah, luas)



6 *Format dan* *Tata Cara Pengisian* **Pendataan**

DAPAT DIAKSES PADA QR CODE BERIKUT:

Scan Me!



Berdasarkan format pendataan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Surat Percepatan Pendataan Perumahan dari Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan tanggal 7 Juli 2025

7 *Daftar* **Pustaka**

Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2025). Nomor PA.0105-Dd/332. Percepatan Pendataan Perumahan. Jakarta.

Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 023/KPTS/M/2025 tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir dalam Mendukung Program 3 Juta Rumah

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Jawa I**



”

Saatnya Rakyat punya Rumah!



***Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman (BP3KP) Jawa I***



<https://pkp.go.id/balai/balai-p2p-jawa-i>



[@pkp_perumahan_jawa1](https://twitter.com/pkp_perumahan_jawa1)



Jl. Wijaya I No.59 8, RT.8/RW.1,
Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12170